

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Almaududi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja dalam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers
- I Nyoman Putu Budhiarta. 2016. *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Khairani. 2021. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Disesuaikan dengan UU No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja/Omnibus Law. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Lalu Husni. 2007. *Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Percetakan M2 Print, Edisi Khusus
- Wafda Vivid Izziyana. 2018. *Hukum Outsourcing di Indonesia*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang *Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang *Pengawasan Ketenagakerjaan*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat*

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang *Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah*

C. Jurnal

Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem *Outsourcing* di Indonesia”, *JH Ius Quia Iustum* Vol. 29, No. 3. (September 2022). 660

Deviera Dika Putri Harlapan dan I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* Tentang Upah”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10, No.3. (3 September 2021). 632

Heidy Annisa Dharmawan dkk. “Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Kerja Lembur”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 7, No. 2. (Oktober 2023). 39

- Kadek Agus Sudiarawan. “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Outsourcing Dari Sisi Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 5, No. 2. (Oktober 2016). 840
- Mangaraja Manurung dan Zuanda. “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Outsourcing di Kota Tanjungbala”, *Citra Jusuticia* Vol. 22, No.1.(1Februari 2021). 3
- Ni Luh Gede Indah Pradnyani Putri dan Kadek Agus Sudiawara. “Efektivitas Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) Pasca UU Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip Keadilan”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12, No. 3. (2023). 407
- Talita Adwa Ardelia dkk. “Analisis Kedudukan Pekerja Outsourcing: Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023”. *Media Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 4. (17 November 2024). 285
- Tiberius Zaluchu dan Niru Anita Sinaga. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*. 64-65

D. Website

- Badan Pusat Statistik Kota Padang. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum tahun 2021-2022. Diakses pada 22 April 2025 dari <https://padangkota.bps.go.id>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat. Profil UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I. Diakses pada 25 Maret 2025 <https://nakertrans.sumbarprov.go.id>
- Fakhruddin Arrazzi. *Pengaduan Belum Ditanggapi Disnakertrans, Pekerja Outsourcing di Poltekkes Laporan ke Ombudsman*. Diakses pada 28 April 2025 dari <https://padangkita.com/pengaduan-belum-ditanggapi-disnakertrans-pekerja-outsourcing-di-poltekkes-laporan-ke-ombudsman>
- Halo Hubungan Kerja Kemnaker. *Outsourcing*. Diakses pada 11 Desember 2024 dari https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/faq_outsourcing.php#
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 29 Januari 2025 dari <https://kbbi.web.id>
- Manajemen SDM. *Mengenai Prinsip TUPE Untuk Perlindungan Pekerja Outsourcing*, Diakses pada 27 Januari 2025 dari

<https://manajemensdm.net/mengenal-prinsip-tupe-untuk-perlindungan-pekerja-outsourcing/>

SIP Law Firm. *Hak dan Kewajiban Karyawan Menurut UU Cipta Kerja*. Diakses pada 11 Desember 2024 dari <https://siplawfirm.id/hak-dan-kewajibankaryawan/>

Vero Ameo. *Gaji Tertahan, Buruh Outshourcing UNAND Meradang*. Diakses pada 23 Januari 2025 dari <https://www.klikata.co.id/berita/81/gaji-tertahan-buruh-outshourcing-unand-meradang.html>

